

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bentuk bisnis kecil seperti Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) berperan sangat penting pada perekonomian nasional suatu negara. Di beberapa negara UMKM merupakan pelaku ekonomi utama yang menjadi tulang punggung dalam ekonomi negara. UU No. 20 tahun 2008 yang mengatur tentang jenis usaha ini, menyatakan bahwa UMKM berlandaskan pada “asas berwawasan lingkungan” yang memiliki arti sebagai asas pemberdayaan dalam usaha yang dalam kegiatannya memprioritaskan tetap untuk menjaga dan memelihara lingkungan hidup. Hal ini mengartikan UMKM memiliki keunggulan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang berfokus pada intensif tenaga kerja, yang mencakup seluruh sektor ekonomi seperti pertanian, perkebunan, perdagangan maupun rumah makan/restoran.

UMKM mendominasi dalam menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan sebagai solusi dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan konferensi *The 6th Annual Islamic Finance Confrence* Tahun 2022 oleh Menteri Keuangan, memberikan pernyataan terkait dengan data seberapa besar pengaruh UMKM dalam perekonomian, yakni UMKM memiliki peranan dalam 90% kegiatan bisnis, lebih dari 50% berkontribusi sebagai penyedia lapangan pekerjaan di seluruh dunia, serta 40% berkontribusi dalam Produk Domestik Bruto (PDB) pada negara-negara berkembang (Kemenkeu, 2022a). Hal tersebut dijadikan sebagai dasar dalam pentingnya pemberdayaan bagi para pelaku UMKM di Indonesia untuk terus dapat meningkatkan produktivitasnya.

Indonesia termasuk dalam salah satu negara berkembang yang memiliki kekuatan perekonomian yang berasal dari para pelaku usaha yang termasuk kedalam UMKM. Berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan Indonesia, bahwa UMKM di Indonesia mewakili 99% dari total keseluruhan kegiatan bisnis, 97% dalam penyerapan tenaga kerja, serta 60% partisipasi penyumbang dalam PDB

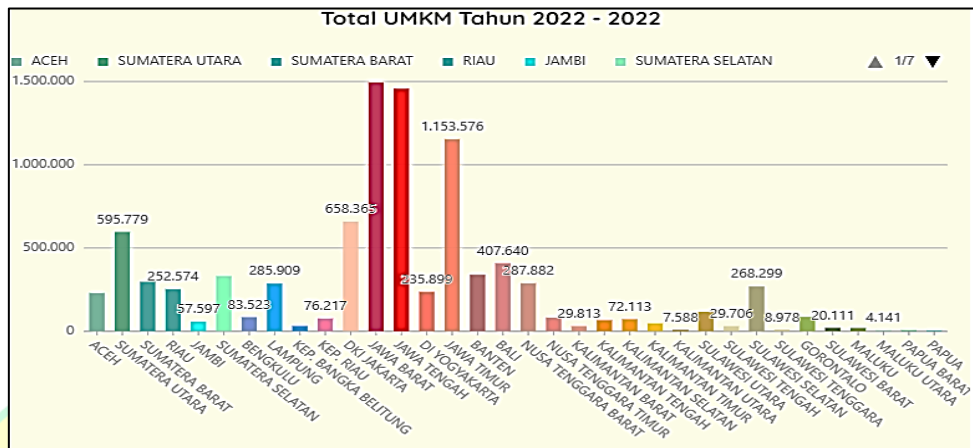
negara Indonesia. Angka tersebut merupakan angka yang cukup besar dalam peranan pada perekonomian negara mengingat jumlah usaha jenis UMKM memang sedang banyak digeluti oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan *ASEAN Investment Report* tahun 2022 yang dilansir dari *Dkatadata.co.id*, Indonesia memiliki jumlah UMKM terbanyak diantara negara ASEAN lainnya yakni sekitar 65,46 juta unit yang tercatat pada tahun 2021(Ahdiat, 2022). Berikut data jumlah unit UMKM yang ada di negara-negara ASEAN yang disampaikan oleh *ASEAN Secretariat* tahun 2022.

Tabel I. 1
Jumlah UMKM Di Negara ASEAN Tahun 2021

No.	Negara	Nilai/Unit Usaha
1	Indonesia	65.465.500
2	Thailand	3.134.400
3	Malaysia	1.226.000
4	Filipina	996.700
5	Vietnam	651.100
6	Kamboja	512.900
7	Singapura	279.000
8	Laos	133.700
9	Myanmar	72.700

Sumber: Data diolah oleh peneliti tahun 2023, dari ASEAN Secretariat Periode Survei Tahun 2021

Sebagai salah satu anggota dalam negara-negara ASEAN, Indonesia berada pada peringkat teratas sebagai negara ASEAN dengan jumlah unit UMKM terbanyak. Jumlah UMKM akan selalu meningkat setiap tahunnya, hal ini memungkinkan banyaknya peluang pekerjaan baru sehingga memungkinkan penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Pemberdayaan masyarakat melalui UMKM juga dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal untuk berwirausaha. Pemberdayaan tersebut dapat dilakukan bukan hanya di kota besar seperti Jakarta, namun menyeluruh di kota-kota lainnya di Indonesia. Berikut data jumlah unit UMKM yang terdaftar di setiap provinsi di Indonesia.



Gambar I. 1

Data Jumlah UMKM Provinsi di Indonesia Tahun 2022

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Dari data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia tahun 2022 tersebut Provinsi Jakarta yang merupakan pusat bisnis Indonesia memiliki jumlah UMKM sebanyak 658.365 unit. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan daerah Provinsi Jawa yang dimana jumlah unit UMKM melebihi 1 juta unit. Hal ini disebabkan oleh populasi penduduk pada provinsi jawa lebih banyak dibandingkan dengan populasi di ibu kota. Selain itu, data survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilansir dalam Kompas.com, menunjukkan 3(tiga) provinsi teratas dengan populasi terbanyak di Indonesia yakni adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, sedangkan untuk Provinsi Jakarta menempati posisi ke-6 jumlah penduduk terbanyak setelah Provinsi Banten (Daniswari, 2021).

Perkembangan UMKM di Indonesia berkembang sangat pesat seiring dengan perubahan kondisi atau keadaan baik secara lokal maupun global. Pengembangan UMKM dilakukan dengan meningkatkan kompetensi dan memperkuat kewirausahaan untuk dapat beradaptasi sesuai dengan permintaan pasar, hasil inovasi, serta pemanfaatan teknologi dalam kegiatan bisnis usaha (Tajuddin & Manan, 2017). Pengembangan ini yang menjadi perhatian pemerintah setiap tahunnya, karena pada dasarnya UMKM merupakan bagian yang terpenting dari pertumbuhan ekonomi negara. Berdasarkan data jumlah UMKM yang dikeluarkan oleh Badan Kementerian Koperasi dan UKM, total UMKM di Indonesia berada di angka 64,19 juta dengan kontribusi PDB sekitar 61,97% atau setara dengan

Rp.8.573.89 triliun (Kementerian Koperasi dan UKM, 2019). Data tersebut menunjukkan bahwasannya keterlibatan UMKM sebagai penyumbang terbesar dalam ekonomi Indonesia.

Terlepas dari kesuksesan UMKM sebagai peyumbang dan penyerap tenaga kerja terbesar, keadaan para UMKM dilapangan tidak selalu berjalan dengan baik. Terdapat banyak hambatan hingga permasalahan yang selalu dihadapi oleh para pelaku UMKM. Keadaan pasca dilanda pandemi pada tahun sebelumnya mengakibatkan banyak dari pelaku UMKM yang memutuskan untuk menutup usahanya akibat dari hasil pendapatan usaha yang semakin menurun. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hasil investigasi oleh Badan Pusat Statistik yang dikutip dari penelitian Amalia (2022), bahwa keadaan UMKM pada masa pandemi mengakibatkan setidaknya 63,9% UMKM terdampak, pendapatan usaha menurun lebih dari 30% dibandingkan dari tahun sebelumnya (Amalia, 2022). Pendapatan UMKM saat pandemi menurun secara signifikan, hal tersebut mengakibatkan pengembangan pada sektor industri UMKM semakin terhambat.

Selain karena adanya pandemi, terdapat permasalahan lainnya yang sering menjadi penghambat bagi UMKM untuk berkembang adalah modal. UMKM merupakan jenis usaha mikro kecil yang dimana sebagian besar modalnya berasal dari perorangan pemilik usaha sehingga tentunya memiliki jumlah yang terbatas. Disisi lain, permasalahan seperti rendahnya pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait dengan dunia usaha dan teknologi. Menteri Perdagangan, Muhammad Luthfi dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman Kementerian Koperasi dan UKM menuturkan bahwa tiga masalah utama yang umumnya dirasakan para pelaku usaha khususnya UMKM saat ini, diantaranya yakni Kurangnya pengalaman berwirausaha yang menjadi penyebab UMKM kesulitan dalam beradaptasi terhadap perkembangan, kurangnya jaringan atau *networking* dalam menjalankan usaha dimana saat ini perkembangan pasar dan teknologi mengakibatkan persaingan yang semakin tinggi sehingga menyulitkan para UMKM untuk berkompetisi, serta kurangnya pendanaan atau modal yang dimiliki para pelaku usaha UMKM (Kemendag, 2021).

Tantangan-tantangan pada UMKM juga disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi para UMKM di tengah kemajuan dunia usaha saat ini adalah kurangnya kemampuan pelaku UMKM dalam akses pasar, kurangnya keterampilan usaha pada Sumber Daya Manusia (SDM), dan kurangnya pemahaman dalam penggunaan teknologi yang lebih modern, serta keterbatasan untuk mengakses layanan keuangan untuk membantu keuangan usaha para UMKM (Kemenkeu, 2022a). Dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwasannya keterampilan, teknologi, dan keuangan adalah masalah yang masih melekat pada UMKM Indonesia.

Dengan adanya permasalahan yang ada tentunya akan berdampak terhadap kelangsungan usaha UMKM. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap pengembangan UMKM di Indonesia. Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Kontan.co.id, menunjukkan bahwa pada tahun 2020 sekitar 69,02% pelaku Usaha Mikro Kecil (UKM) kekurangan modal dan membutuhkan bantuan modal usaha (Yuniartha, 2020). Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk mendorong masalah permodalan UMKM dengan memberikan fasilitas penyediaan kredit yang berupa pinjaman untuk membantu permodalan yang dibutuhkan bagi para pelaku usaha. Fasilitas kredit yang disediakan pemerintah untuk UMKM dikenal dengan sebutan Kredit Usaha Rakyat atau bisa dikenali dengan KUR yang disalurkan melalui layanan bank di Indonesia dan lembaga pembiayaan dengan dibawah pengawasan Bank Indonesia. Saat ini fasilitas kredit yang disalurkan melalui bank-bank Indonesia memiliki jenis dan nama yang berbeda. Dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha untuk menjamin perkembangan UMKM dan mampu meningkatkan pendapatan UMKM dimasa mendatang. Modal merupakan bagian dari faktor produksi yang menjadi inti utama dalam mendirikan sebuah usaha.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per Agustus 2022, total kredit perbankan sebesar Rp.1.214 triliun atau setidaknya 19,7% dari keseluruhan pendanaan kredit oleh bank yang tersedia yakni sekitar Rp.6.155 triliun. Sedangkan pada lembaga pembiayaan, berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan pembiayaan UMKM diangka Rp.151,9 triliun atau sebesar 32,9% dari

seluruh pembiayaan oleh lembaga pembiayaan (OJK, 2022). Dari data tersebut pemerintah terus meningkatkan pemberian fasilitas kredit untuk UMKM dengan menambah porsi kredit UMKM sebesar 30% pada tahun 2024 mendatang setelah sebelumnya menerima 20% pada tahun 2022. Pemberian fasilitas kredit ini merupakan salah satu strategi ditujukan untuk mengembangkan UMKM dengan memberikan bantuan dana berupa pinjaman modal usaha untuk menunjang bisnis usaha UMKM. Menurut Okello dan Simeo (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “*Effect Of Accessing Bank Credit Facilities*” menunjukkan bahwasannya UMKM yang menerima fasilitas kredit lebih memungkinkan mendapat keuntungan usaha yang lebih tinggi.

Faktor lainnya yakni rendahnya pengetahuan pelaku usaha dalam bidang usaha serta penggunaan teknologi untuk menunjang jalannya usaha. Kemajuan teknologi saat ini memang sudah sangat dirasakan di setiap aspek kehidupan. Kurangnya pengetahuan yang berhubungan dalam kemajuan teknologi informasi akan berdampak tidak berkembangnya sarana dan prasarana dan tidak mendorong kemajuan usaha (Anggarani et al., 2015).

Penggunaan teknologi saat ini memang sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dilansir dari Rappler.com dalam penelitian sebelumnya oleh *Centre of Information Policy and Governance* bahwa saat ini Indonesia merupakan salah satu dari sekian negara di Asia dengan tingkat penggunaan internet tertinggi yakni hingga 51% (Sintia, 2019). Hal ini lah yang mendasari bahwa penggunaan internet yang banyak tersebut menjadi hal yang tepat untuk dimanfaatkan pula oleh para pelaku usaha seperti UMKM untuk menjual atau memasarkan produknya.

Dalam hal ini para pelaku UMKM dinilai masih minim untuk memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada untuk kegiatan usahanya. Dengan adanya sarana teknologi Informasi (TI) seharusnya dapat membantu memudahkan dalam kegiatan penjualan maupun pemasaran produknya sehingga dapat memberikan akses pasar yang lebih luas. Kunci keberhasilan bagi sebuah usaha seperti UMKM adalah dengan adanya pasar yang luas dan jelas untuk barang dan jasa yang diproduksinya (Tajuddin & Manan, 2017).

Sejak tahun 2019 silam pemerintah mencanangkan untuk perubahan digital bagi para pelaku usaha dimana salah satu targetnya ada pelaku UMKM. Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan yang menjabat saat itu menyampaikan tentang pentingnya pemerintah untuk mengupayakan peningkatan dalam men-diigitalisasikan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), tercatat sejak Juni 2022 setidaknya 19,5 juta UMKM sudah dalam lingkungan ekonomi digital dan akan meningkat setiap tahunnya (Kemenkeu, 2022b). Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam pengembangan UMKM dengan program UMKM *Go Digital* yang berbasis pemanfaatan *E-Commerce*.

Salah satu contoh yang saat ini menjadi trend dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam dunia bisnis yakni tergabung dan bermitra dengan *e-commerce* (Pradiani, 2018). *E-commerce* merupakan media untuk menjual-membeli hasil produksi dengan menggunakan teknologi berbasis internet, dimana hal ini memberikan kemudahn bagi penjual maupun pembeli untuk saling berinteraksi. Penggunaan teknologi seperti ini tentunya dapat memberikan keuntungan bagi dunia bisnis yakni meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam aktifitas jual-belinya.

Menindaklanjuti program UMKM *go-digital* tersebut tentunya pemerintah berusaha keras untuk memberikan pelayanan pada UMKM diberbagai bagian wilayah di Indonesia dengan adanya bagian kedinasan yang bertanggung jawab atas bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM yakni Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM). Pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta memiliki program tersendiri untuk UMKM sebagai bentuk pembinaan khusus yang difokuskan untuk pelaku bisnis dan UMKM di Jakarta. Program tersebut dikenal dengan sebutan *Jakpreneur*, melalui program tersebut pemerintah dinas DKI Jakarta melakukan pembinaan dan pemberdayaan secara terpadu kepada para pelaku usaha.

Program *Jakpreneur* merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah Kota Jakarta yang memberikan fasilitas kepada para pelaku UMKM khususnya di wilayah Jakarta untuk dapat melakukan pengembangan pada usahanya. Fasilitas

tersebut antara lain adalah pelatihan, pendampingan, permodalan, perizinan usaha, pemasaran, serta pelaporan keuangan. Program Jakpreneur merupakan singkatan dari *Jakarta Entrepreneurs* yang anggotanya adalah para UMKM yang berada di wilayah kota Jakarta. Program ini sebagai bentuk pengembangan yang dilakukan Pemerintah Kota Jakarta untuk membantu UMKM dalam menghadapi permasalahan usahanya. Jakpreneur bekerjasama dengan Lembaga Keuangan penyedia fasilitas kredit UMKM yang berasal dari Pemerintah Indonesia seperti Bank DKI, Koin Works, dan Pegadaian. Selain itu, program ini juga sebagai bentuk program pemerintah terkait dengan upaya dalam transformasi UMKM pada dunia digital yakni “UMKM Go Digital” tertuma dalam pemasaran yang bekerjasama pada perusahaan *e-commerce* terkenal Indonesia seperti Tokopedia dan Shopee.

Pada laman resmi Jakpreneur, jumlah UMKM yang terdaftar sebagai peserta dari Jakpreneur per 23 Maret 2023 sebanyak 351.112 unit UMKM dari seluruh wilayah di Jakarta. Hal tersebut menunjukkan jumlah UMKM yang tergabung dalam program pemerintah masih setengahnya dari jumlah UMKM secara keseluruhan di Jakarta. Hal ini dapat dijadikan sebagai target pemerintah Kota Jakarta untuk dapat terus mengembangkan programnya agar para UMKM lainnya di Jakarta dapat lebih terintegrasi. Berikut perkembangan jumlah UMKM binaan pada program Jakpreneur :

Tabel I. 2
Jumlah UMKM Pendaftar Jakpreneur Tahun 2019-2022

No	Wilayah	Pendaftaran			
		2019	2020	2021	2022
1	Jakarta Pusat	12.615	17.658	20.432	9.299
2	Jakarta Utara	13.542	18.571	15.754	6.730
3	Jakarta Barat	11.333	23.010	20.643	10.923
4	Jakarta Selatan	11.816	23.355	25.944	12.573
5	Jakarta Timur	14.828	24.983	25.751	12.776
6	Kepulauan Seribu	1.364	2.347	769	389
Total		65.498	109.924	109.293	52.690

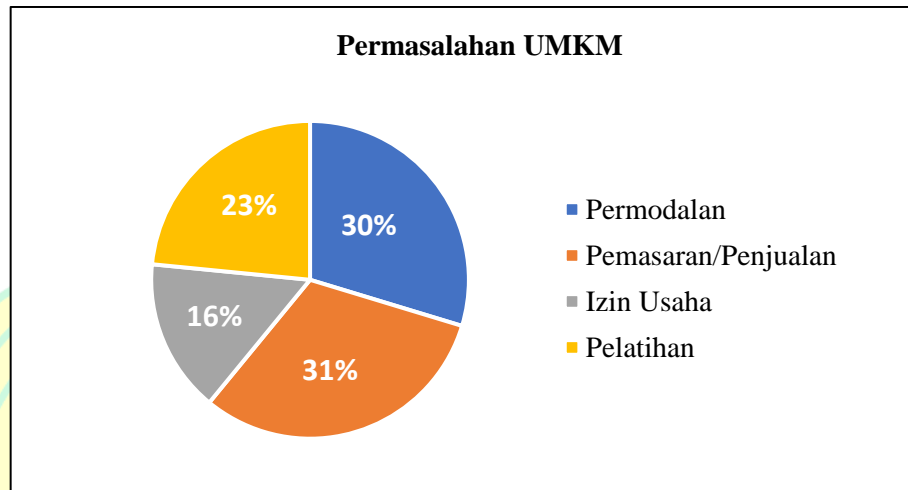
Sumber : Data diolah peneliti tahun 2023, dari Dinas PPKUKM Kota Jakarta

Dari data diatas, peningkatkan jumlah UMKM yang mendaftar pada program Jakpreneur secara keseluruhan mengalami peningkatan yang signifikan, namun pada tahun 2022 jumlah pendaftar program ini mengalami penurunan. Keadaan pasca pandemi memang memberikan pengaruh besar dalam menurunnya kegiatan bisnis tidak terkecuali UMKM. Wilayah Jakarta Timur memiliki jumlah pendaftar paling banyak setiap tahunnya. Meskipun pada tahun 2022 relatif mengalami penurunan pendaftar, tetapi wilayah Jakarta Timur masih menempati posisi pertama sebagai jumlah pendaftar UMKM Jakpreneur terbanyak. Antusias masyarakat untuk kembali bangkit dengan UMKM dapat dilihat dari banyaknya jumlah pendaftar Program Jakpreneur ini.

Dilihat dari tabel I.2 diatas, menunjukkan pada tahun 2019-2022 UMKM di wilayah Jakarta Timur mengalami peningkatan yang cukup stabil, yakni dimana tahun 2019 UMKM yang mendaftar berjumlah 14.828 unit usaha yang dimana terus mengalami peningkatan pada dua tahun berikutnya yakni tahun 2020 sebanyak 24.983 pendaftar, dan tahun 2021 sebanyak 25.751 pendaftar. Sedangkan pada tahun berikutnya yakni tahun 2022, jumlah UMKM yang mendaftar mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya bahkan lebih rendah dibandingkan jumlah pendaftar di tahun 2019 yaitu hanya sebanyak 12.776 unit usaha UMKM yang mendaftar.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ira Amalia (2022) terkait dengan produktivitas UMKM di Jakarta Timur, perkembangan UMKM di wilayah Jakarta Timur secara umum yakni sebanyak 6,4juta unit UMKM pada tahun 2018, dan mengalami peningkatan pada tahun berikutnya yakni menjadi 6,5juta unit usaha dengan rata-rata pendapatan usaha sebesar Rp.46,50 juta setiap tahunnya. Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan UMKM di wilayah Jakarta lainnya. Hal ini tidak sejalan dengan penuturan menurut Dinas PPKUKM Kota Jakarta, dimana wilayah Jakarta Timur merupakan daerah yang menjadi pusat pertumbuhan UMKM di Jakarta. Hal ini disebabkan sebagian wilayah di Jakarta Timur merupakan pusat bagi pasar-pasar tradisional yang mana penduduk di daerah tersebut mayoritas beriwirausaha. Salah satunya daerah di Jakarta Timur sebagai pusat pertumbuhan UMKM yakni beraada di Kecamatan

Kramat Jati. Namun perkembangan UMKM di lokasi tersebut masih tertinggal dan kurang mendapat perhatian dalam upaya pengembangannya.



Gambar I. 2
Hasil Riset Permasalahan yang Dihadapi UMKM

Sumber : Data Primer diolah peneliti tahun 2023

Hasil temuan observasi dengan melakukan riset pada beberapa UMKM di lokasi Kecamatan Kramat Jati, menunjukkan hasil para pelaku UMKM di wilayah tersebut mengungkapkan bahwa permodalan dan pemasaran masih menjadi permasalahan yang umumnya dihadapi oleh mereka. Hal ini menjadi pendorong utama para UMKM di wilayah tersebut memilih untuk bergabung pada program seperti Jakpreneur dengan harapan dapat membantu usahanya lebih baik.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait dengan masih banyaknya permasalahan yang dihadapi para UMKM. Adanya program Jakpreneur menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap para pelaku UMKM di wilayah Jakarta dimana mereka dapat mengandalkan fasilitas yang ada pada Jakpreneur untuk membantu dalam pengembangan usahanya. Dengan adanya program Jakpreneur diharapkan dapat membantu merealisasikan bantuan pemerintah dalam pemberian permodalan usaha sebagai upaya untuk menghidupkan kembali UMKM Indonesia pasca pandemi, serta dalam memperluas pasar agar dapat memasarkan hasil produksinya dengan memanfaatkan *e-commerce* sebagai bentuk dari UMKM *Go Digital*. Dari data yang disajikan pada program Jakpreneur sudah dapat memberikan gambaran keberhasilan dalam upaya pengembangan usaha dari

UMKM. Dari pemaparan dan penjelasan sebelumnya sesuai dengan permasalahan yang ada, peneliti berniat untuk melaksanakan riset penelitian yang sberjudul **“Pengaruh Fasilitas Kredit dan *E-Commerce* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Jakpreuner Di Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur”**

1.2 Pertanyaan Penelitian

Dari penjelasan sebelumnya, maka selanjutnya dapat ditentukan masalah-masalah yang dibuat dalam bentuk pertanyaan penelitian yang nantinya digunakan untuk dasar pembahasan penelitian. Berikut permasalahan yang akan dibahas dalam pembahasan penelitian ini adalah :

1. Apakah fasilitas kredit memiliki pengaruh terhadap perkembangan UMKM pada UMKM Jakpreuner di Kecamatan Kramat Jati?
2. Apakah *e-commerce* memiliki pengaruh terhadap perkembangan UMKM pada UMKM Jakpreuner di Kecamatan Kramat Jati?
3. Apakah fasilitas kredit dan *e-commerce* secara simultan memiliki pengaruh terhadap perkembangan UMKM pada UMKM Jakpreuner di Kecamatan Kramat Jati?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari perumusan pertanyaan penelitian sebelumnya yang telah diuraikan di atas, antara lain:

1. Untuk menemukan dan mengathui pengaruh Fasilitas Kredit terhadap Perkembangan UMKM pada UMKM Jakpreuner di Kecamatan Kramat Jati.
2. Untuk menemukan dan mengathui pengaruh *E-commerce* terhadap Perkembangan UMKM pada UMKM Jakpreuner Kecamatan Kramat Jati.
3. Untuk mengetahui dan membuktikan fasilitas kredit dan *e-commerce* berpengaruh secara bersamaan (simultan) terhadap perkembangan UMKM pada UMKM Jakpreuner di Kecamatan Kramat Jati.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil dari penelitian dapat memberikan manfaat bagi banyak orang, yakni :

1. Bagi Peneliti

Memberikan pengalaman serta pengetahuan dan wawasan bagi peneliti. Selain itu, menjadikan ini sebagai kewajiban tahap akhir dalam menyelesaikan studi dan sebagai implementasi ilmu yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan studi yang memberikan informasi dan literatur penelitian serta memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penelitian selanjutnya agar dapat lebih mendalami terkait dengan UMKM pada program Jakpreuner.

3. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan untuk dapat terus mengembangkan program-program yang menaungi para UMKM yang kedepannya dapat dilakukan di berbagai kota di Indonesia selain Jakarta sebagai upaya dalam meningkatkan pengembangan UMKM Indonesia.

4. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan serta wawasan bagi masyarakat yang ingin memulai bisnisnya mengenai fasilitas kredit dan digitalisasi bagi para pelaku UMKM untuk dapat mengembangkan usahanya. Serta masyarakat yang masih awam dengan program pemerintah terkait dengan bidang usaha di Indonesia.